

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Bulan April 2026

Perkembangan inflasi di Kota Lubuk Linggau pada triwulan 2 Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pada April 2026 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kota Lubuk Linggau sebesar 1,79 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,44 Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,28 persen dengan andil inflasi sebesar -0,09 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,96 persen dengan andil inflasi sebesar 0,11 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,37 persen dengan andil inflasi sebesar 0,05 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 2,97 persen dengan andil inflasi sebesar 0,22 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,41 persen dengan andil inflasi sebesar 0,04 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 5,06 persen dengan andil inflasi sebesar 0,11 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,51 persen dengan andil inflasi sebesar 0,08 persen; kelompok penyedia makanan dan minuman/restoran sebesar 1,61 persen dengan andil inflasi sebesar 0,12 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,61 persen dengan andil inflasi sebesar 0,87 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu: kelompok transportasi sebesar 1,80 persen dengan andil inflasi sebesar 0,21 persen; dan kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,72 persen dengan andil inflasi sebesar 0,07 persen. Tingkat Inflasi month to month (m-to-m) bulan januari sebesar 0,15 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Kota Lubuk Linggau bulan Januari sebesar 0,85 persen.

Pada April 2026, tingkat inflasi y-on-y Kota Lubuk Linggau sebesar 1,79 persen dan tingkat inflasi y-to-d sebesar 0,85 persen. Tingkat inflasi y-on-y untuk April 2024 sebesar 2,01 persen, sedangkan tingkat inflasi y-on-y untuk April 2026 sebesar 1,79 persen.

Tabel Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Year to Date (y-to-d), dan Year on Year(y-on-y) Kota Lubuk Linggau bulan Januari 2024-2026
Tabel Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Year to Date (y-to-d), dan Year on Year(y-on-y) Kota Lubuk Linggau bulan Juli 2024-2026
(Persen)

Tingkat Inflasi	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)
Month to Month (m-to-m)	0,36	1,29	0,15
Year to Date (y-to-d)	0,73	1,92	0,85
Year on Year (y-on-y)	2,45	2,22	1,79

Tingkat Inflasi Year onvYear (y-on-y) Kota Lubuk Linggau

**Gambar 1 Tingkat Inflasi *Year on Year* (y-on-y) Kota Lubuk Linggau
bulan April, 2024-2026 (Persen)**

2. Bulan Mei 2026

35. Pada Mei 2026 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kota Lubuk Linggau sebesar 2,85 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,35. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,31 persen dengan andil inflasi sebesar 0,72 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,86 persen dengan andil inflasi sebesar 0,10 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,99 persen dengan andil inflasi sebesar 0,14 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 2,68 persen dengan andil inflasi sebesar 0,20 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,03 persen dengan andil inflasi sebesar 0,03 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 7,13 persen dengan andil inflasi sebesar 0,15 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,56 persen dengan andil inflasi sebesar 0,08 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,27 persen dengan andil inflasi sebesar 0,17 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 10,27 persen dengan andil inflasi sebesar 0,84. Sementara kelompok yang mengalami penurunan indeks yaitu: kelompok transportasi sebesar 2,56 persen dengan andil inflasi sebesar 0,30 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 2,77 persen dengan andil inflasi sebesar 0,12 persen.

Tingkat inflasi month to month (m-to-m) bulan Mei 2026 sebesar 0,83 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Kota Lubuk Linggau bulan Mei 2026 sebesar 1,69 persen.

Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Year to Date (y-to-d), dan Year on Year (y-on-y) Kota Lubuk Linggau bulan Mei, 2023-2025 (Persen)

Tingkat Inflasi (1)	2024 (2)	2025 (3)	2026 (4)
Month to Month (m-to-m)	0,14	-0,21	0,83
Year to Date (y-to-d)	0,87	0,71	1,69
Year on Year (y-on-y)	2,51	1,85	2,85

Tingkat Inflasi Year on Year (y-on-y) Kota Lubuk Linggau bulan Mei,
2024 - 2026 (Persen)

Gambar 1 Tingkat Inflasi Year on Year (y-on-y) Kota Lubuk Linggau bulan Mei, 2024-2026 (Persen)

3. Bulan Juni 2026

Pada Juni 2026 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kota Lubuk Linggau sebesar 3,18 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,83 persen. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,65 persen dengan andil inflasi sebesar 0,82 persen; Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 1,99 persen dengan andil inflasi sebesar 0,11 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 3,17 persen dengan andil inflasi sebesar 0,24 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,69 persen dengan andil inflasi sebesar 0,02 persen; kelompok transportasi sebesar 4,82 persen dengan andil inflasi sebesar 0,57 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 6,26 persen Dengan andil inflasi sebesar 0,14; kelompok pendidikan sebesar 1,59 persen dengan andil inflasi sebesar 0,08 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,29 persen dengan andil inflasi sebesar 0,17 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 9,16 persen dengan andil inflasi sebesar 0,75 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,05 persen dengan andil inflasi sebesar 0,15 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 3,09 persen dengan andil inflasi sebesar 0,13 persen.

Tingkat inflasi month to month (m-to-m) bulan Juni 2026 sebesar 0,43 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Kota Lubuk Linggau bulan Juni 2026 sebesar 2,13 persen.

Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Year to Date (y-to-d), dan Year on Year (y-on-y) Kota Lubuk Linggau bulan Juni , 2024-2026 (Persen)

Tingkat Inflasi	2024	2025	2026
-----------------	------	------	------

(1)	(2)	(3)	(4)
Month to Month (m-to-m)	-0,10	0,11	0,43
Year to Date (y-to-d)	0,77	1,82	2,13
Year on Year (y-on-y)	2,16	2,07	3,18

Tingkat Inflasi Year on Year (y-on-y) Kota Lubuk Linggau bulan Juni 2024- 2026 (Persen)

Gambar 1 Tingkat Inflasi Year on Year (y-on-y) Kota Lubuk Linggau bulan Juni, 2024-2026 (Persen)

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Pada Triwulan II, pengendalian inflasi di Kota Lubuk Linggau masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang berpotensi memengaruhi stabilitas harga barang dan jasa, antara lain:

1. Inflasi masih berada di atas rentang sasaran nasional.

Kota Lubuk Linggau masih mengalami tekanan inflasi tahunan yang relatif tinggi pada awal tahun 2026. Pada Februari 2026, inflasi tercatat sebesar **4,13% (y-on-y)**, terutama dipengaruhi kenaikan harga kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

- Ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah** masih tinggi, khususnya untuk komoditas hortikultura seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, serta beberapa komoditas strategis lainnya. Kondisi ini menyebabkan harga di Kota Lubuk Linggau sangat sensitif terhadap gangguan produksi maupun distribusi dari daerah pemasok.
- Fluktuasi harga komoditas pangan strategis** masih terjadi pada Triwulan II akibat meningkatnya permintaan pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), perubahan musim, dan terbatasnya produksi beberapa komoditas hortikultura.

Biaya distribusi yang relatif tinggi akibat posisi Kota Lubuk Linggau sebagai daerah

4.

perdagangan yang bergantung pada jalur distribusi antardaerah menyebabkan kenaikan biaya angkut berdampak langsung terhadap harga di tingkat konsumen.

5. **Produksi pangan lokal belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat**, sehingga upaya stabilisasi harga masih sangat bergantung pada kelancaran pasokan dari daerah produsen melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD).
6. **Pemanfaatan cadangan pangan dan operasi pasar** masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan intervensi harga lebih cepat dan tepat sasaran ketika terjadi lonjakan harga komoditas tertentu.
7. **Pemantauan stok dan harga** di tingkat distributor, pasar tradisional, maupun ritel modern masih memerlukan penguatan agar potensi kelangkaan pasokan dapat diantisipasi lebih dini.
8. **Sinergi antar perangkat daerah dan stakeholder** dalam pelaksanaan program pengendalian inflasi masih perlu diperkuat, khususnya dalam percepatan pelaporan, pertukaran data, dan pelaksanaan aksi lapangan sesuai Roadmap TPID. Evaluasi sebelumnya juga menunjukkan pentingnya penguatan koordinasi lintas OPD dan sistem pemantauan harga.
9. **Belum optimalnya pemanfaatan pekarangan pangan dan urban farming** sebagai sumber pasokan alternatif komoditas penyumbang inflasi, sehingga ketahanan pangan rumah tangga masih perlu diperkuat.
10. **Risiko cuaca dan perubahan iklim** berpotensi mengganggu produksi hortikultura pada semester berikutnya sehingga perlu diantisipasi melalui peningkatan kerja sama pasokan, penguatan cadangan pangan, dan perluasan Gerakan Menanam.
11. **Isu Prioritas Triwulan II Tahun 2026** Menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas pangan strategis, terutama beras, cabai merah, bawang merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras. • Memperkuat implementasi
12. **Kerja Sama Antar Daerah (KAD)** untuk menjamin kontinuitas pasokan. • Mengoptimalkan pelaksanaan **Gerakan Pangan Murah (GPM)**, operasi pasar, dan pasar murah pada periode kenaikan harga. • Memperkuat pemantauan harga dan stok secara harian melalui TPID serta meningkatkan koordinasi dengan distributor, Bulog, BPS, dan Bank Indonesia. • Mendorong peningkatan produksi pangan lokal melalui pemanfaatan lahan pekarangan, greenhouse, dan program **Taman Inflasi** sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar daerah.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan inflasi di daerah

Mekanisme Koordinasi TPID

Tugas-tugas TPID dilakukan melalui pertemuan dalam bentuk high level meeting dan melalui mekanisme koordinasi, yaitu dengan melakukan rapat koordinasi untuk merumuskan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti pemerintah daerah untuk mencegah dan menanggulangi kenaikan dan ketidakstabilan inflasi serta melakukan koordinasi dengan TPID di tingkat Provinsi.

Mekanisme koordinasi TPID :

Laporan TPID Kab/Kota

Laporan TPID Prov/Kab/Kota

Kepada Gubernur

Pelaksanaan Program Kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kota Lubuklinggau pada Triwulan I tahun 2025 mengacu pada 9 langkah upaya dalam pengendalian inflas dalam rangka pemenuhan program kerja pengendalian inflasi yang mencakup 4k yaitu : keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. Pada triwulan ke 1 tahun 2025 ini pemeritah kota lubuklinggau telah melaksanakan 5 upaya dari 9 langkah upaya berikut. Adapun 5 upaya dalam pengendalian inflasi yang telah dilakukan pemerintah kota lubuklingga adalah sebagai berikut :

1. Pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia.

Kegiatan pemantauan harga dilakukan setiap hari oleh petugas dari disperindag untuk dilaporkan di system pemantauan pasar dan kebutuhan pokok (SP2KP). Adapun komoditi yang dipantau antara lain : beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, cabe merah, cabe rawit, bawang merah, bawang putih, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, jagung pipilan, garam halus, kedelai, ikan segar, semen, biji kontruksi, baja ringan, triplek, kayu balok,

kayu papan, paku, pupuk, benih dan gas LPG 3 kg. selain itu disperindag juga melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok lainnya yang melekat secara tupoksi pada disperindag kota lubuklinggau.

Kegiatan pemantauan stok pangan yang dilakukan petugas dinas ketahanan pangan setiap minggunya dengan mendata stok yang di bulog, distributor pedagang grosir, dan pedagang eceran. Kegiatan pemantauan ini bertujuan untuk tercapainya ketersediaan bahan pangan utama dengan harga yang stabil dan tersedianya data panel/informasi harga dan pasokan pangan di tingkat produsen, pedagang grosir dan pedagang eceran secara berkala. Adapun komoditi yang menjadi objeknya antara lain : komoditi beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabe besar, cabe rawit, daging sapi, daging ayam, telur ayam, gula pasir, minyak goreng, dan tepung terigu. Variable yang menjadi tolak ukurnya adalah stok awal, jumlah produksi, barang yang diimpor, barang yang diekspor, ketersediaan barang dan perkiraan kebutuhan.

1. Rapat teknis tim pengendali inflasi daerah

Pemerintah kota Lubuklinggau melalui tim TPID melakukan rapat teknis tim pengendali inflasi daerah dalam upaya pengendalian inflasi. Adapun rapat yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflansi Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau H Trisko Defriyansa Menghadiri Rakor Pengendalian Inflasi Pembahasan Dana Alokasi Khusus dan Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Dalam Program 3 Juta Rumah melalui Zoom Meeting di Command Center Pemkot Lubuk Linggau

Hari / tanggal : Senin / 06 April 2026

Tempat : Ruang Command Center Pemkot Lubuk Linggau

Rakor bersama Kemendagri tanggal 06 April 2026.

2. Pelaksanaan Kegiatan Rakor Mingguan bersama Kemendagri

Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau, H Trisko Defriyansa menghadiri Rakor Pengendalian Inflasi dan Evaluasi Dukungan Pemerintah dalam Program 3 Juta Rumah melalui Zoom Meeting di Command Center Pemkot Lubuk Linggau. Senin, (13/4/2026). Turut hadir Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, H Emra Endi Kusuma, Staf Ahli II, H. Wiwin Eka Saputra, Kabag Perekonomian dan SDA, Yulia Efrina.

Hari / tanggal : Senin/ 13 April 2026

Tempat : Command Center Lubuk Linggau

Dokumentasi Sekda didampingi Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan dan Staf Ahli beserta Kepala OPD terkait lainnya mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi tanggal 13 April 2026

3. Pelaksanaan Sosialisasi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Distribusi Gas 3 Kg Tepat Sasaran

Hari / tanggal : Kamis / 16 April 2026

Tempat : Ruang Cinema Hall Lantai 5 Pemkot Lubuk Linggau

Wali Kota Lubuk Linggau, Rachmat Hidayat menghadiri Sosialisasi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Distribusi Gas 3 kg Tepat Sasaran dan Diskusi Pembahasan Sistem Distribusi Gas 3 Kg di Cinema Hall Lt.5 Pemkot Lubuk Linggau, Kamis (16/4/2026) Wali kota menegaskan pentingnya pengawasan agar LPG 3 kg benar-benar diterima masyarakat yang berhak, serta mendorong sinergi OPD dan pihak terkait guna memastikan distribusi berjalan efektif dan transparan. Kegiatan ini diharapkan menghasilkan langkah konkret dalam memperbaiki sistem distribusi gas 3 kg di Kota Lubuk Linggau. Turut hadir Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan H. Emra Endi Kusuma, Kepala Disperindag Medhio Line Sapta Windu, Kepala Dinas Sosial Hasan Andria, Plt Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Iie Sumirat, serta para camat

Dokumentasi Pelaksanaan Sosialisasi Tanggal 16 April 2026

4. Mengikuti Rakornas Mitigasi Kekeringan Lahan Pertanian

Wakil Wali Kota Lubuk Linggau Hadiri Rakornas Mitigasi Kekeringan Lahan Pertanian Jakarta- Wakil Wali Kota (Wawako) Lubuk Linggau, H Rustam Effendi didampingi Kepala Dinas Pertanian, Hj Dwi Eri Yanti menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Mitigasi

Kekeringan Lahan Pertanian Tahun 2026 yang di inisiasi oleh Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian yang berlangsung di Auditorium Kementan RI Senin (20/4/2026). Dalam Rakornas tersebut juga membahas terkait sasaran pemerintah dalam memitigasi pemanfaatan Sumber Daya Alam di setiap daerah dengan kemandiriannya melalui, Pangan, Protein, Biodiesel B-50, dan Bioethanol-e-20. Dalam arahannya, Menteri Pertanian RI, Dr Ir H Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga ketahanan pangan, khususnya di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin tidak menentu. Ia menekankan bahwa mitigasi kekeringan harus dilakukan secara terencana, terintegrasi, dan berbasis data. "Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan ketersediaan air untuk lahan pertanian. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret seperti optimalisasi embung, irigasi, serta penggunaan teknologi pertanian modern, sehingga diperlukan juga kekompakan kita bersama antara Pemerintah Daerah dan Kementerian Pertanian dalam mewujudkan Indonesia Swasembada Pangan," ujarnya. Kementerian Pertanian sambung Amran, memberikan bantuan kepada setiap daerah yang sudah menyampaikan usulannya dalam percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pemanfaatan pompanisasi, penggunaan varietas tanaman tahan kekeringan, serta penguatan sistem informasi iklim dan pertanian, melalui program-program yang ada di Kementrian Pertanian RI. "Dengan optimalisasi infrastruktur air yang ada, penggunaan benih unggul tahan kering, serta optimalisasi lahan-lahan tadah hujan yang selama ini kurang produktif. Tidak ada waktu untuk menunggu. Setiap hari adalah kesempatan untuk menyelamatkan produksi pangan nasional," tegasnya.

Dokumentasi Pelaksanaan Mitigasi Resiko Kekeringan Lahan Pertanian, Senin 20 April 2026

5. Mengikuti Rakor Mingguan dengan Kemendagri

Hari / tanggal : Senin / 20 April 2026

Tempat : Ruang Command Center Pemkot Lubuk Linggau

Pemerintah Kota Lubuklinggau ikuti rakor pengendalian inflasi dalam program tiga juta rumah serta sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal melalui zoom meeting di Command Centre Silampari, Kota Lubuklinggau.

Dokumentasi Rakor Tanggal 20 April 2026

6. Sekretaris Daerah selaku Ketua Harian TPID Kota Lubuk Linggau Melaksanakan Audiensi dengan Pihak Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Selatan

Hari/Tanggal : Senin, 27 April 2026

Tempat : Bank Indonesia Kantor Perwakilan
Sumatera Selatan

Dokumentasi Pelaksanaan Audiensi Sekretaris Daerah dengan kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Selatan

7. Wali Kota Memimpin Rapat Evaluasi Pembatasan Volume Pembelian Solar Bersubsidi, Siapkan Pengaturan Jam Pengisian LUBUK LINGGAU – Wali Kota Lubuk Linggau, H. Rachmat Hidayat memimpin rapat evaluasi pelaksanaan surat edaran wali kota terkait penjadwalan dan pembatasan volume pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Wali Kota Lubuk Linggau, Senin, 15 Juni 2026. Dalam arahannya, H. Rachmat Hidayat menyampaikan bahwa surat edaran tersebut telah diterapkan selama kurang lebih tiga minggu. Karena itu, evaluasi dilakukan untuk memastikan distribusi dan pengisian BBM bersubsidi berjalan lebih tertib serta tepat sasaran. Menurutnya, pembatasan pembelian solar bersubsidi tetap diberlakukan dengan ketentuan kendaraan roda empat maksimal 40 liter per hari, kendaraan roda enam maksimal 100 liter per hari, dan kendaraan yang lebih besar dari roda enam maksimal 200 liter per hari. “Pada hari ini kita melakukan evaluasi agar pengisian BBM lebih tertib dan pembatasan pembelian dapat berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan,” ujarnya. H. Rachmat Hidayat menjelaskan, Kota Lubuk Linggau merupakan daerah perlintasan yang dilalui banyak kendaraan dari berbagai daerah. Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan BBM tidak hanya digunakan oleh masyarakat Kota Lubuk Linggau, tetapi juga oleh kendaraan yang melintas. Karena itu, ia berharap surat edaran yang telah diterbitkan dapat menciptakan ketertiban dalam pengisian BBM serta mengurangi potensi kemacetan di sekitar stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). “Hendaknya pengisian BBM dapat lebih tertib dan tidak menimbulkan kemacetan dengan tetap menghormati pengguna jalan lainnya,” katanya. Dalam evaluasi tersebut, pemerintah juga menemukan masih adanya kendaraan yang telah dimodifikasi untuk menampung BBM solar dalam jumlah besar atau yang dikenal sebagai pengunjal solar. Temuan ini menjadi perhatian serius untuk segera dilakukan penertiban. “Hal ini perlu diatur dan ditertibkan agar tidak menyulitkan masyarakat, khususnya pengguna kendaraan pribadi yang ingin mengisi BBM,” tegasnya. Selain itu, Pemerintah Kota Lubuk Linggau berencana mengatur jam operasional pengisian solar bersubsidi dengan membagi waktu pengisian antara siang dan malam hari. Skema tersebut akan mempertimbangkan berbagai jenis kendaraan, seperti kendaraan angkutan barang, pengangkut sembako, mobil pemadam kebakaran, kendaraan pengangkut sampah, ambulans, travel, hingga kendaraan pribadi apakah memungkinkan untuk melakukan pengisian pada siang hari. Pemkot juga mempertimbangkan pendataan kendaraan yang rutin membeli solar bersubsidi guna memudahkan pengawasan sekaligus mencocokkan kebutuhan BBM solar di wilayah Kota Lubuk Linggau. Rapat evaluasi tersebut turut dihadiri Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Emra Endi Kusuma, Kabag Perekonomian dan SDA, Yulia Efrina, Kepala Dinas Perhubungan Kota Lubuk Linggau, Hendra Gunawan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Lubuk Linggau, Medhio Line Sapta Windu, Kepala DPMPSTP Kota Lubuk Linggau, M Johan Imam Sitepu,

perwakilan PT Pertamina, pihak SPBU, serta sejumlah instansi terkait lainnya.

Dokumentasi Pelaksanaan Rapat Evaluasi Pembatasan Volume Pembelian Solar Bersubsidi

1. Pencanaan gerakan menanam
2. Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat didampingi Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan H Emra Endi Kesuma dan Kepala Dinas Pertanian, Hj Dwi Eri Yanti menyerahkan secara simbolis bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berupa traktor roda dua sebanyak tiga unit kepada kelompok tani dalam wilayah Kota Lubuk Linggau, di Kantor Dinas Pertanian, Kamis (16/4/2026). Selain Alsintan juga diserahkan bantuan berupa benih jagung. Bantuan ini berasal dari Kementrian Pertanian di Kantor Dinas Pertanian.

Hari/tanggal : Kamis /16 April 2026

Tempat : Dinas Pertanian Kota Lubuk Linggau

Dokumentasi Penyerahan Bantuan Mesin Pertanian berupa traktor dan benih jagung

2. Wawako Rustam Effendi Hadiri Gerakan Tanam Padi, Herman Deru Apresiasi Lubuk Linggau Pertahankan Sawah LUBUK LINGGAU - Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, H Rustam Effendi menghadiri kegiatan Gerakan Tanam Padi dalam rangka menyongsong El Nino serta mendukung pencapaian target produksi padi tahun 2026 bersama Gubernur Sumatera Selatan, H Herman Deru melalui Zoom Meeting serentak se-Sumatera Selatan. Kegiatan tersebut berlangsung di Jalan Kerto Mas, Kelurahan Karang Ketuan, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, diawali dengan penanaman padi bersama para peserta yang hadir. Dalam arahannya, Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru mengapresiasi semangat Pemerintah Kota Lubuk Linggau dalam mempertahankan sektor pertanian meskipun berstatus sebagai kota. Menurutnya, komitmen menjaga lahan sawah agar tidak dialihfungsikan sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan. Ia juga menegaskan agar perlindungan lahan pertanian diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Wali Kota (Perwal), sehingga keberadaan sawah tetap terjaga dan produktivitas pertanian dapat dipertahankan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Emra Endi Kusuma, Kepala Dinas Pertanian Hj Dwi Eri Yanti, Kasdim Letkol Inf Khoirul Ansory, Kapolsek Lubuk Linggau Selatan Nyoman Sutrisno, Camat Lubuk Linggau Selatan II Widya Wulandari, serta Lurah Karang Ketuan.

Hari/tanggal : Selasa /19 Mei 2026

Tempat : Kelurahan Karang Ketuan Kec. Lubuk Linggau Selatan II

Dokumentasi kegiatan zoom meeting sekaligus panen raya jagung yang dilaksanakan serentak bersama Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo dan jajaran polri se Indonesia

3. Pelaksanaan Gerakan Panen Raya Jagung serentak

Hari/tanggal : Sabtu /07 Maret 2026

Tempat : Kelurahan Batu Urip

Tanam Raya Kuartal I Dukung Swasembada Pangan 2026 LUBUK LINGGAU - Wali Kota Lubuk Linggau, H. Rachmat Hidayat diwakili Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Lubuk Linggau, H. Emra Endi Kusuma menghadiri kegiatan Tanam Raya Kuartal I dalam rangka mendukung program Swasembada Pangan Tahun 2026 di Jl. Madani RT 07 Kelurahan Batu Urip, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Sabtu (7/3/2026). Kegiatan yang diinisiasi oleh Polres Lubuk Linggau tersebut merupakan salah satu upaya mendorong peningkatan produksi pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di wilayah Kota Lubuk Linggau. Melalui kegiatan tanam raya ini diharapkan dapat meningkatkan semangat para petani serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat dalam mewujudkan swasembada pangan di Kota Lubuk Linggau. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolres Lubuk Linggau, Kompol M. Syamsul Zachri, Kepala Dinas Pertanian Kota Lubuk Linggau, Hj. Dwi Eri Yanti, Kepala Dinas Perikanan, H. Kamaludin, Lurah Batu Urip, serta para anggota kelompok tani setempat.

Dokumentasi Kegiatan Tanam Raya Kuartal I di Kelurahan Batu Urip

1. Melaksanakan Operasi pasar Murah bersama Dinas Terkait
2. Pelaksanaan Operasi Pasar Murah

Hari / tanggal : Rabu / 15 April 2026

Tempat : Halaman Kantor Camat Lubuk Linggau Barat I

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, H Emra Endi Kesuma membuka kegiatan pasar murah yang dilaksanakan oleh Pertamina Regional Sumbagsel. Rabu (15/4/2026). Kegiatan ini dilaksanakan di halaman kantor kecamatan Lubuklinggau Barat II. Selain pasar murah, ada juga pengecekan kesehatan gratis, dan ganti oli motor gratis. Dalam sambutannya, Emra menyampaikan terima kasih kepada pihak Pertamina yang telah memberikan perhatian kepada masyarakat Kota Lubuk Lnggau ditengah kondisi harga sembako yang mengalami

kenaikan harga. "Oleh karena itu pemerintah hadir bersama Pertamina untuk memberikan perhatian kepada masyarakat. Kami menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan ini, " ungkapnya. Ia menghimbau kepada masyarakat untuk mengikuti kegiatan tersebut secara tertib dan aman. "Ikuti sesuai antriannya, " ungkapnya

Dokumentasi Operasi Pasar Murah oleh Pertamina tanggal 15 April 2026

2. Bazar Pasar Murah menyambut Hari Raya Idul Adha

Hari/tanggal : Jum'at /21 Mei 2026

Tempat : Halaman Kantor Camat Lubuk Linggau Timur I

Hari/tanggal : Selasa /25 Mei 2026

Tempat : Alun-alun Merdeka Kota Lubuk Linggau

Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Sembako Tebus Murah di Balai Pemkot Lubuk Linggau

3. Wali kota Lubuk Linggau Buka Gerakan Pangan Murah LUBUK LINGGAU-Wali kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat membuka secara resmi Gerakan Pangan Murah di Kantor Camat Lubuk Linggau Timur I, Kamis (21/5/2026) Dalam kesempatan tersebut, wali kota menyampaikan sejumlah bahan pangan dijual dengan harga distributor dan mendapat subsidi dari pemerintah. Subsidi yang diberikan antara lain untuk beras SPHP dengan potongan harga sekitar Rp10.000 per karung 5 Kg. Sementara untuk beberapa komoditas lainnya, subsidi yang diberikan mencapai sekitar Rp 5.000. Pemerintah juga memberikan kewenangan kepada panitia pelaksana untuk mengatur distribusi bahan pangan agar bantuan dapat tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Program ini menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Melalui kegiatan Gerakan Pangan Murah, dia berharap mampu membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sekaligus menekan lonjakan harga bahan pangan menjelang Idul Adha. "Melalui Gerakan Pangan Murah pemerintah hadir untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau," imbuhnya. Selaib itu, dengan adanya program ini dapat menjaga stabilitas harga pangan dan meringankan beban

masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Turut hadir, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, H Tegi Bayuni, Kadistan, Hj Dwi Eri Yanti, Kadishub, H Hendra Gunawan, Kadis Perindag, Medho Line SW, Kasat Pol PP, Fahrizal Raharja, Kabag Prokopim, Taufik Hidayat dan perwakilan instansi terkait lainnya

Hari/tanggal : Kamis /21 Mei 2026

Tempat : Kantor Camat Lubuk Linggau Timur I

Dokumentasi Gerakan Pangan Murah, Kamis 21 Mei 2026

4. Melakukan Tinjauan ke Pasar Murah

Hari/tanggal : Senin /25 Mei 2026

Tempat : Pelataran Masjid Agung As-Salam

Kota Lubuk Linggau

Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, H Rustam Effendi meninjau pelaksanaan bazar murah dalam rangka menyambut Idul Adha 1447 H / 2026 di pelataran Masjid Agung As-Salam Kota Lubuklinggau, Senin 25 Mei 2026 Bazar tersebut menggelar sejumlah lapak sembako diantaranya beras SPHP dari Bulog, telur, bawang, minyak goreng serta sejumlah kebutuhan dapur lainnya. H Rustam Effendi mengatakan, ada sejumlah kupon uang dibagikan dari Bank Sumsel Babel untuk masyarakat berbelanja dan mendapatkan potongan harga dari kupon tersebut. "Kecuali beras, karena beras tersebut sudah disubsidi pemerintah, " katanya. Harapannya, dengan kegiatan tersebut masyarakat dapat terbantu terlebih menjelang perayaan hari besar dimana biasanya harga kebutuhan sehari-hari terjadi kenaikan. "Alhamdulillah antusias masyarakat cukup tinggi, semoga bisa terus kita laksanakan untuk membantu masyarakat, " ungkapnya.

Dokumentasi Pelaksanaan Bazar Murah dalam rangka Idul Adha, Senin, 25 Mei 2026

1. Memastikan Ketersediaan Stok agar tidak terjadi kelangkaan

1. Pelaksanaan Sidak ke SPBU dalam rangka memastikan Ketersediaan Stok BBM bersubsidi di Kota Lubuk Linggau. Peninjauan Pendistribusian BBM Bersubsidi Wali Kota Lubuk Linggau, H. Rachmat Hidayat, meninjau secara langsung pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di beberapa titik SPBU di Kota Lubuk Linggau. Kamis, 11 Juni 2026. Wali Kota didampingi oleh Ka. Disperindag dan beberapa OPD terkait.

1. Melaksanakan kerja Sama Antar Daerah

Upaya memperkuat ketahanan pangan, menjaga stabilitas harga, dan mengendalikan inflasi secara berkelanjutan terus dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Selatan. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah melalui penguatan sinergi antardaerah dengan melaksanakan kegiatan Capacity Building TPID yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) bersama Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak, Kabupaten Magelang, serta TPID Provinsi Sulawesi Selatan

Dokumentasi Penanda tanganan Kerja Sama Antar Daerah TPID Kab/Kota di Sumatera Selatan dengan TPID Kabupaten Demak dan Magelang Provinsi Jawa Tengah, Selasa tanggal 23 Juni 2026.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kota Lubuk Linggau pada Triwulan II Tahun 2026 secara umum **berjalan cukup efektif** melalui penguatan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Kota Lubuk Linggau, Bank Indonesia, BPS, Bulog, instansi vertikal, serta pelaku usaha dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan strategis. Pemerintah Kota juga secara rutin mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat sebagai bentuk penguatan koordinasi kebijakan.

Berdasarkan perkembangan inflasi, tekanan harga mulai menunjukkan **tren yang lebih terkendali** dibandingkan awal tahun. Setelah inflasi tahunan (y-on-y) mencapai **4,13% pada Februari 2026**, inflasi menurun menjadi **2,95% pada Maret 2026**, yang mengindikasikan bahwa berbagai langkah stabilisasi harga mulai memberikan hasil positif. Penurunan tersebut didukung oleh mulai normalnya pasokan pangan setelah periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri serta pelaksanaan berbagai program pengendalian inflasi.

Pelaksanaan kebijakan melalui pendekatan **4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif)** telah berjalan dengan baik, antara lain melalui:

- pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar pada komoditas strategis;
- penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk menjaga kontinuitas pasokan pangan;
- monitoring harga dan stok secara rutin pada pasar tradisional, distributor, dan ritel modern;
- koordinasi intensif dengan Bulog dalam menjaga ketersediaan beras dan komoditas strategis lainnya; serta
- penyampaian informasi perkembangan inflasi kepada masyarakat sebagai upaya pengendalian ekspektasi inflasi.

Namun demikian, evaluasi pelaksanaan kebijakan masih menunjukkan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu:

1. Ketergantungan pasokan komoditas hortikultura dari luar daerah masih cukup tinggi sehingga fluktuasi produksi di daerah pemasok masih berpengaruh terhadap harga di Kota Lubuk Linggau.
2. Intervensi pasar pada beberapa komoditas masih bersifat responsif ketika harga telah meningkat, sehingga perlu diperkuat langkah antisipatif berbasis sistem peringatan dini.
3. Produksi pangan lokal belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga diperlukan peningkatan program pengembangan komoditas strategis berbasis kawasan dan pemanfaatan lahan pekarangan.
4. Penguatan data harga harian, stok pangan, dan informasi distribusi antarwilayah masih perlu dioptimalkan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih cepat dan tepat.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi pada Triwulan II Tahun 2026 telah menunjukkan hasil yang positif dalam menjaga stabilitas harga. Meskipun demikian, keberlanjutan program penguatan pasokan, peningkatan produksi pangan lokal, optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD), pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan perlu terus ditingkatkan agar inflasi Kota Lubuk Linggau tetap berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional pada semester berikutnya. Tren tersebut juga sejalan dengan proyeksi bahwa tekanan inflasi pada Triwulan II cenderung lebih stabil setelah normalisasi permintaan pasca-HBKN, dengan tetap mewaspadai risiko dari komoditas hortikultura dan distribusi pangan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengendalian inflasi pada Triwulan II Tahun 2026, TPID Kota Lubuk Linggau merekomendasikan beberapa kebijakan strategis sebagai berikut:

1. **Memperkuat implementasi strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif)** melalui sinergi yang lebih intensif antara Pemerintah Kota, Bank Indonesia, BPS, Bulog, instansi vertikal, BUMD, distributor, dan pelaku usaha sebagai upaya menjaga stabilitas harga pangan secara berkelanjutan.
2. **Mengoptimalkan Kerja Sama Antar Daerah (KAD)** dengan daerah sentra produksi, khususnya untuk komoditas penyumbang inflasi seperti beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan komoditas hortikultura lainnya, guna menjamin kontinuitas pasokan dan mengurangi risiko gejolak harga.
3. **Meningkatkan frekuensi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, dan pasar murah** pada lokasi yang mengalami kenaikan harga, dengan melibatkan Bulog, distributor, BUMN pangan, serta pelaku usaha untuk menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.
4. **Memperkuat sistem pemantauan harga dan stok pangan secara harian** melalui digitalisasi pelaporan serta penyusunan neraca pangan daerah sebagai dasar

pengambilan kebijakan yang cepat, tepat, dan berbasis data.

5. **Mendorong peningkatan produksi pangan lokal** melalui pengembangan kawasan hortikultura, pemanfaatan lahan pekarangan, optimalisasi greenhouse/Taman Inflasi dan gerakan menanam komoditas penyumbang inflasi secara berkelanjutan.
6. **Meningkatkan kelancaran distribusi pangan** melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten pemasok, pelaku logistik, dan distributor agar hambatan distribusi dapat diminimalkan, terutama pada komoditas yang berasal dari luar daerah.
7. **Mengoptimalkan pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)** dan memperkuat koordinasi dengan Bulog sebagai langkah antisipatif dalam menghadapi potensi gejolak harga akibat gangguan pasokan maupun peningkatan permintaan.
8. **Memperkuat komunikasi publik** melalui publikasi perkembangan harga, edukasi pola konsumsi bijak, diversifikasi pangan lokal, serta penyampaian informasi yang akurat untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.
9. **Meningkatkan intensitas pelaksanaan High Level Meeting (HLM) dan Rapat Teknis TPID** sebagai forum evaluasi berkala terhadap perkembangan inflasi serta percepatan pengambilan keputusan apabila terjadi kenaikan harga komoditas strategis.
10. **Memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dalam pelaksanaan Roadmap TPID Tahun 2025-2027** dengan menetapkan indikator kinerja yang terukur pada setiap program pengendalian inflasi sehingga pelaksanaan kebijakan dapat dievaluasi secara berkala dan berkelanjutan. **Penutup** Dengan pelaksanaan rekomendasi tersebut, TPID Kota Lubuk Linggau diharapkan mampu menjaga inflasi tetap terkendali, memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan efektivitas pelaksanaan strategi 4K, serta mendukung tercapainya sasaran inflasi nasional melalui penguatan koordinasi, stabilisasi pasokan, kelancaran distribusi, dan perlindungan daya beli masyarakat.